

# **Mencermati Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah**

Tatag Yuli Eko Siswono  
Jurusan Matematika FMIPA  
Universitas Negeri Surabaya

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah mulai diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia sejak tahun 2006. KTSP berbeda dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia sebelumnya. Pemerintah telah mengupayakan pelaksanaan KTSP ini melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan pengembangan, maupun penataran-penataran pada tingkat nasional maupun daerah-daerah, sehingga sampai saat ini kurikulum tersebut sudah tersebar cukup merata di sekolah-sekolah. Sekarang bagaimana pelaksanaan kurikulum tersebut?

Makalah ini mendeskripsikan hasil pengamatan dan wawancara terhadap guru dan pihak yang terkait yang berada pada 40 sekolah (SD, SDLB, SMP, SMPLB, MTs, SMA, MA, dan SMK) di Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Lamongan, dan Bangkalan. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penyusunan KTSP dan kendalanya, kegiatan belajar mengajar termasuk penilaiannya, sarana dan prasarana, serta dampak penetapan standar kelulusan terhadap penerapan pembelajaran. Hasilnya sekolah yang sudah menyusun kurikulum sendiri 52,5%, dan 47,5% belum menyusun kurikulum sendiri. Alasan tidak membuat kurikulum tersebut, antara lain karena tidak adanya dana, belum ada pelatihan, kurang memahami KTSP, dan sarana-prasarana yang terbatas. Guru-guru menyusun RPP hanya bersifat administratif belum banyak yang sesuai dengan pelaksanaan di kelas. Pada beberapa sekolah, patokan kelulusan pada UNAS berdampak pada pembelajaran yang hanya memusatkan pada ketuntasan materi bukan pada kompetensi yang diharapkan. Tetapi pada sekolah yang lebih "maju", kondisi itu tidak berpengaruh karena sudah disiapkan program pembimbingan di luar jam pelajaran untuk persiapan UNAS.

**Kata kunci:** *KTSP, UNAS, penilaian, KKM*

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah mulai diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia sejak tahun 2006. Jika diterapkan mulai pada tingkat kelas awal, maka saat ini paling tidak di SD sudah sampai pada siswa kelas 2, SMP kelas 8, dan SMA/SMK pada siswa kelas 11. Hal yang berbeda dari KTSP dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia sebelumnya adalah kurikulum tersebut dikembangkan oleh satuan pendidikan sendiri. Pengembangannya dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik,

tetapi tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai acuan yang harus diikuti setiap satuan pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan pelaksanaan KTSP ini melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan pengembangan, maupun penataran-penataran pada tingkat nasional maupun daerah-daerah, sehingga sampai saat ini kurikulum tersebut sudah tersebar cukup merata di sekolah-sekolah.

Banyak keraguan tentang pelaksanaan kurikulum tersebut di lapangan pada awalnya. Seperti dikatakan Prof. Mansyur Ramly, Kepala Balitbang Depdiknas (2007) yang menjelaskan seiring dengan diberlakukannya KTSP, pada masa transisi ini banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum buatan sendiri. Kendalanya, banyak guru yang tidak tahu bagaimana menyusun kurikulum model KTSP. Oleh karena itu, lanjut Ramly, sambil menunggu kesiapan guru dan tenaga pelaksana di lapangan, Balitbang Depdiknas telah menyediakan dua paket kurikulum model KTSP, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung bisa diaplikasikan di sekolah. Dijelaskan bahwa banyak guru yang kebingungan dengan model KTSP karena sudah lama guru menerima kurikulum dalam bentuk jadi dari pemerintah pusat. Padahal, KTSP menuntut kreativitas untuk menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal. Sekarang, setelah berselang masa selama 2 tahun, bagaimana kondisi di lapangan? Apakah sekolah dengan kreativitas gurunya sudah mengembangkan kurikulum secara mandiri? Kalau belum, apakah masalahnya sama seperti yang ditengarai itu? Bagaimana kemungkinan solusi dari masalah tersebut?

Ramly (2007) mengatakan bahwa pada prinsipnya model KTSP bukan kurikulum baru, hanya modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Jadi bukan berarti kita ganti kurikulum. Targetnya pada 2008 semua sekolah sudah bisa menyusun kurikulum model KTSP ini. Pernyataan ini merupakan tantangan untuk dijelaskan sampai sejauh mana target ketercapaiannya saat ini. Selain itu, pernyataan ini merupakan paradoks yang kenyataannya kurikulum diganti tetapi dikatakan tidak ganti atau sekedar ganti nama saja. Apakah paradoks tersebut terjadi di lapangan atau bagaimana pendapat guru terhadap pelaksanaan kurikulum itu?

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum tidak akan bermakna, jika tidak diterapkan dalam pembelajaran dan sebaliknya, pembelajaran tidak akan efektif jika tanpa kurikulum

yang jelas sebagai acuan (Sanjaya, 2008). Ini berarti bahwa pembelajaran yang efektif dari segi produk maupun proses harus didasarkan pada acuan berupa kurikulum yang tepat, sesuai dengan perkembangan psikologi, teori belajar, teknologi informasi, maupun penemuan di bidang-bidang pengetahuan. Prinsip pembelajaran dalam KTSP didasarkan pada sejumlah prinsip yang termuat pada PP No. 19 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memberi ruang yang cukup untuk pengembangan prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran harus mendorong siswa untuk aktif sesuai dengan gaya belajarnya, guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajarannya. Bagaimana kenyataan di lapangan setelah pemberlakuan KTSP, apakah guru terdorong untuk berusaha mengembangkan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan, yaitu pembelajaran yang mengaktifkan siswa? Apakah pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat? Pertanyaan-pertanyaan itu yang berusaha dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan.

Masalah krusial lain yang berkaitan dengan KTSP adalah pelaksanaan ujian nasional (UN). Marcellino (2007) mengatakan bahwa KTSP yang dibuat sesuai kreativitas guru, dan kondisi muatan lokal sangat kontradiktif dengan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Prinsip UN yang sentralistik, justru menghambat otonomi sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya. KTSP juga menyesuaikan dengan konteks kultural dari sekolah itu berada dalam komunitas tersebut. Atas dasar ini, bobot mutu pendidikan yang direalisasikan pada suatu mata pelajaran tertentu, dari satu sekolah tertentu dengan kondisi finansial tertentu akan berbeda dengan sekolah lain di daerah lain dengan kondisi finansial yang lain pula. Pemahaman ini yang memicu sekolah untuk memprioritaskan pada aspek hasil dari ujian nasional daripada aspek manfaat atau proses pendidikan yang diselenggarakan. Apalagi kondisi sekolah yang bervariasi dalam sarana prasarana ataupun sumber daya semakin menguatkan kontradiksi itu. Sebenarnya bagaimana kenyataan di lapangan? Apakah ujian nasional dan penetapan standar kelulusan memberi dampak pada penekanan kegiatan pembelajaran di kelas? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan di jawab dalam pembahasan tulisan ini.

Tulisan ini mendeskripsikan hasil pengamatan dan wawancara terhadap beberapa sekolah di Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik,

Lamongan, dan Bangkalan. Sasaran observasi tidak dilakukan secara *purposive sampling*, karena tujuannya menggali informasi secara kualitatif pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi sekolah. Sekolah tersebut terdiri dari sekolah negeri dan swasta yang meliputi SD, SDLB, SMP, SMPLB, MTs, SMA, MA, dan SMK sebanyak 40 sekolah. Pembahasan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yang lebih bersifat kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan hasil observasi dan wawancara oleh mahasiswa S1 Jurusan Matematika angkatan 2004 dan 2005 pada tahun 2007 dan 2008. Data hasil studi ini dianalisis dengan tahapan, yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penyimpulan. Reduksi data adalah kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah di lapangan. Pemaparan data meliputi pengklasifikasi dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan menverifikasi kesimpulan tersebut.

Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi (1) Apakah sekolah sudah menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan KTSP 2006? Jika belum, apa saja kendalanya; (2) Apakah RPP yang disusun guru menunjukkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa (inovatif); (3) Apakah guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang dirancang?; (4) Apakah guru sudah menerapkan pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa? Berapa persen dari seluruh kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan?; (5) Bagaimana cara penilaian yang dilakukan?; (6) Untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM), apakah dianalisis sesuai dengan pedoman pada KTSP 2006? Jika tidak, mengapa demikian?; (7) Bagaimana sarana dan prasarana sekolah itu?; (8) Apakah adanya ujian akhir nasional (UAN) dengan penetapan skor tertentu memberi dampak pada penerapan pembelajaran inovatif?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi KTSP di beberapa sekolah, pelaksanaan pembelajaran berdasar KTSP, dan penilaian, serta dampak ujian nasional yang berkaitan dengan proses pembelajaran bagi sekolah. Penelitian ini tidak menggeneralisasi tentang pelaksanaan KTSP di suatu wilayah, tetapi memberikan gambaran/deskripsi pelaksanaan beberapa sekolah yang menjadi sasaran penelitian.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)**

Kurikulum pada dasarnya memiliki tiga dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran (Sanjaya, 2008:4). Pandangan kurikulum sebagai mata pelajaran dianggap sebagai pandangan tradisional, karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah terjadi pergeseran fungsi sekolah. Sekolah mempunyai beban yang semakin kompleks yang tidak hanya membekali siswa dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sekolah dituntut mengembangkan minat dan bakat, membentuk moral dan kepribadian, serta memenuhi dunia pekerjaan.

Tuntutan baru yang dibebankan masyarakat kepada sekolah mengakibatkan pergeseran makna kurikulum. Kurikulum tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran, tetapi dipandang sebagai pengalaman belajar. Kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah yang berada pada tanggung jawab guru atau sekolah. Pandangan ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh penemuan-penemuan dan pandangan dari psikologi belajar. Oleh karena itu, belajar bukan hanya mengumpulkan sejumlah pengetahuan, tetapi proses perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi karena siswa memiliki pengalaman belajar. Dengan demikian, untuk memahami kurikulum tidak cukup hanya melihat dokumen tertulisnya saja, tetapi bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan siswa di sekolah maupun luar sekolah. Hal tersebut berkaitan dengan evaluasi keberhasilan pelaksanaan kurikulum, yaitu bahwa pencapaian target pelaksanaan kurikulum tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa menguasai isi atau materi, tetapi harus dilihat dari proses atau kegiatan siswa sebagai pengalaman belajar. Kurikulum sebagai pengalaman belajar ini dianggap sebagai konsep yang luas, sehingga maknanya menjadi kabur dan tidak fungsional. Ketidaksepakatan terhadap pengertian ini melahirkan kurikulum sebagai suatu program atau rencana untuk belajar.

Kurikulum sebagai perencanaan belajar dikemukakan oleh Taba (dalam Sanjaya, 2008:8). Kurikulum adalah suatu rencana untuk belajar, sehingga apa yang diketahui tentang proses belajar dan pengembangan individu mengacu pada sebuah bentuk kurikulum. Kurikulum adalah perencanaan yang berisi tentang petunjuk belajar dan hasil yang diharapkan. Pengertian ini sejalan dengan UU No. 20 tahun

2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.. Batasan ini memperlihatkan bahwa kurikulum terdiri dari dua aspek, yaitu sebagai rencana dan pengaturan tujuan, isi dan cara pelaksanaan rencana itu. Kurikulum sebagai rencana digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru. Kurikulum sebagai pengaturan tujuan, isi, dan cara pelaksanaannya digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum memiliki tiga peran yang sangat penting, yaitu peran konservatif, kreatif, serta peran kritis dan evaluatif (Hamalik, dalam Sanjaya, 2008). Peran konservatif kurikulum berkaitan dengan peran dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang mewarisi nilai-nilai dan budaya masyarakat. Peran kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Peran kreatif kurikulum karena sekolah sesuai tuntutan perkembangan zaman memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru dan inovatif. Hal tersebut karena masyarakat tidak statis tetapi dinamis yang mengalami perubahan. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat. Peran kreatifnya, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial yang selalu bergerak dan berubah. Peran kritis dan evaluatif dari kurikulum didasarkan pandangan bahwa tidak semua nilai dan budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman harus dimiliki setiap anak didik. Tidak semua budaya dan nilai-nilai lama yang dipertahankan. Dengan demikian kurikulum berperan menyeleksi dan mengevaluasi nilai dan budaya yang bermanfaat untuk kehidupan anak didik.

KTSP merupakan kurikulum terbaru yang diharapkan memiliki peran konservatif, kreatif, maupun kritis dan evaluatif dalam penerapannya saat ini. KTSP merupakan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) atau dikenal dengan Kurikulum 2004. KTSP tetap sebagai kurikulum berbasis kompetensi karena berlandaskan pada UU RI no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan yang salah satu berupa standar kompetensi lulusan (Bab X, pasal 36).

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP yang dilakukan oleh satuan pendidikan merupakan ciri yang berbeda dari kurikulum yang digunakan sebelumnya. Kurikulum sebelumnya lebih bersifat sentralistik (terpusat), sedang KTSP merupakan kurikulum yang desentralistik dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan daerah. KTSP sebagai kurikulum operasional masih tetap mengacu standar isi maupun kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dengan demikian dapat dipahami bahwa KTSP sebagai kurikulum yang bersifat operasional paling tidak memiliki tiga makna. Pertama, dalam pengembangannya tidak lepas dari ketetapan-ketetapan yang disusun pemerintah secara nasional melalui BSNP. BSNP menetapkan standar nasional pendidikan, seperti standar isi, standar kompetensi lulusan, proses, ataupun penilaian. Kedua, pengembangan KTSP harus memperhatikan ciri khas daerah, sesuai UU No 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 2 bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ketiga, pengembangan KTSP memberikan peluang dan keleluasaan pada guru ataupun sekolah menciptakan strategi dan metode pembelajaran, media, maupun evaluasi sesuai kondisi dan karakteristik siswa di sekolah.

Pemaknaan KTSP sebagai kurikulum operasional yang seharusnya dikembangkan sendiri oleh sekolah menjadi kabur dalam implementasi dan pelaksanaannya. Karena orientasi kurikulum yang masih dipandang sebagai isi dari mata pelajaran, maka adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap mata pelajaran sudah cukup bagi guru melaksanakan pembelajaran tanpa harus mengembangkan kurikulum sendiri. Selain itu, kecenderungan budaya global yang disebarkan melalui media dan teknologi informasi menyurutkan penonjolan budaya, ciri, maupun potensi daerah yang berbeda. Kurikulum dikembangkan dengan tujuan yang seragam sesuai tuntutan global. Misalkan suatu sekolah mendapatkan emas pada olimpiade matematika dan diberitakan secara nasional maupun internasional, maka semua sekolah meniru berupaya mendapatkan prestasi dalam olimpiade, sehingga kurikulumnya diarahkan mencapai hal itu.

Pada kurikulum sebelum KTSP, guru dibebankan tugas administratif membuat perencanaan pembelajaran yang dikenal dengan nama rencana pelajaran

(RP) dan satpel (satuan pelajaran). Pada KTSP, guru juga diminta membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) beserta kelengkapannya. Isi dari perencanaan pembelajaran itu paling tidak berisi uraian kegiatan inti dan proses pembelajaran yang menuntut strategi, metode, media yang sesuai dengan karakteristik siswa serta mengaktifkan siswa. Untuk itu pada kurikulum sekarang maupun sebelumnya, peluang dan keleluasaan menciptakan inovasi pembelajaran sebenarnya sama. Dengan demikian tidak ada jaminan KTSP akan mendorong pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif, jika tidak ada kesadaran diri, motivasi, maupun keyakinan untuk mengubah cara pandang (paradigma) dalam pembelajaran.

## B. Pembelajaran dalam KTSP

Keterkaitan suatu kurikulum dengan pembelajaran digambarkan dalam beberapa model (Oliva dalam Sanjaya, 2008), yaitu model dualistik (*the dualistic model*), model berkaitan (*the interlocking model*), model konsentris (*the concentric model*), dan model siklus (*the ciclical model*). Model dualistik memandang bahwa antara kurikulum dan pembelajaran sebagai sesuatu yang terpisah. Kurikulum yang seharusnya sebagai input dan pedoman menata pembelajaran, serta pembelajaran yang seharusnya sebagai balikan dalam proses penyempurnaan tidak tampak. Model berkaitan memandang antara kurikulum dan pembelajaran sebagai suatu sistem yang memiliki hubungan. Antara kurikulum dan pembelajaran ada bagian-bagian yang berpadu atau berkaitan. Model konsentris memandang bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan dengan kemungkinan salah satu bagian dari yang lainnya. Model siklus memandang bahwa kurikulum dan pembelajaran sebagai sesuatu yang saling pengaruh dan memiliki hubungan timbal balik. Kurikulum menjadi dasar dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran dapat mempengaruhi keputusan untuk kurikulum sendiri.

KTSP sebagai suatu kurikulum operasional menempatkan pembelajaran sebagai suatu komponen yang saling mempengaruhi. Hubungan keduanya mengikuti model siklis. KTSP digunakan sebagai pedoman yang minimal digunakan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut.

1. Merumuskan tujuan dan indikator kompetensi yang harus dimiliki siswa.

2. Menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan dan kompetensi.
3. Menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa sebagai upaya pencapaian tujuan.
4. Menentukan keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi melalui evaluasi atau penilaian.

Pembelajaran di kelas yang didasarkan pada karakteristik siswa dan potensi daerah mempengaruhi isi dari KTSP untuk tiap satuan pendidikan pada masing-masing daerah. KTSP yang dikembangkan oleh tiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip (BSNP, 2006), yaitu (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prinsip-prinsip ini yang dapat memberi warna yang berbeda-beda pada tiap satuan pendidikan di masing-masing daerah sesuai potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan lingkungannya. Perbedaan atau keragaman yang terjadi harus tetap terpadu, relevan dengan kehidupan nyata, serta sesuai dengan kepentingan nasional. Subtansi kurikulum harus mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang keilmuan, teknologi, maupun seni yang disajikan secara berkesinambungan untuk menunjang pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik belajar sepanjang hayat.

Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal berikut (BSNP, 2006), yaitu (1) peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, (2) pengembangan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, (3) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, (4) tuntutan pengembangan daerah dan nasional, (5) tuntutan dunia kerja, (6) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (7) agama, (8) dinamika perkembangan global, (9) persatuan dan nilai-nilai kebangsaan, (10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (11) kesetaraan jender, dan (12) karakteristik satuan pendidikan. Acuan operasional pelaksanaan KTSP ini menunjukkan bahwa keterkaitan kurikulum dan pembelajaran juga mengikuti model siklik. Keragaman agama, potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, karakteristik satuan pendidikan, kecerdasan

dan minat, tuntutan dunia kerja, jender, serta perkembangan global mempengaruhi model dan strategi pembelajaran yang dikembangkan masing-masing satuan pendidikan pada masing-masing daerah.

KTSP berisi 4 komponen, yaitu (1) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur program dan muatan KTSP, (3) kalender pendidikan, dan (4) silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum pendidikan, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 pasal 26. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 pasal 6 dan 7. Kalender pendidikan disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Berdasar silabus tersebut, guru mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi-strategi pembelajaran yang inovatif dan melibatkan siswa dimunculkan pada silabus dan RPP itu.

Kegiatan pembelajaran pada penerapan KTSP harus dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik (BSNP, 2006:16). Dengan demikian, kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas paling sedikit mempertimbangkan interaksi antar semua komponen yang terlibat, menggunakan pendekatan bervariasi, dan berpusat pada siswa. BSNP (2006:3) juga menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum (KTSP) ditujukan antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk belajar membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, apakah acuan kegiatan pembelajaran yang inovatif (dalam artian berpusat pada siswa secara aktif dan menggunakan strategi yang bervariasi) seperti yang dicanangkan KTSP sudah diterapkan oleh guru? Pertanyaan ini perlu untuk dijawab mengingat ukuran keberhasilan dari suatu kurikulum termasuk bagaimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan, sekaligus keberhasilan keluaran dari proses tersebut.

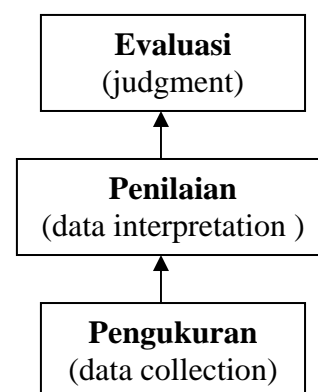
Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dilakukan evaluasi atau penilaian. Dalam KTSP ditetapkan dan diatur pada standar penilaian yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

### C. PENILAIAN DAN PENETAPAN KKM

Evaluasi (*evaluation*), asesmen atau penilaian (*assesment*), pengukuran (*measurement*) merupakan istilah yang saling berkaitan dan bermakna berbeda. Evaluasi berkaitan dengan pengambilan keputusan maupun pertimbangan (*judgment*) terhadap sesuatu. Penilaian merupakan bagian dari evaluasi yang lebih luas dari sekedar pengukuran. Pengukuran pada umumnya berkaitan dengan masalah kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur.

Print (dalam Sanjaya, 2008:337) menggambarkan hubungan evaluasi, penilaian, dan pengukuran dalam diagram berikut.

Berdasar diagram itu, pengambilan keputusan berupa evaluasi dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan pengukuran. Data yang terkumpul kemudian dilakukan interpretasi melalui penilaian. Hasil penilaian tersebut dikumpulkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan melalui evaluasi.



Dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada penilaian, karena istilah ini yang digunakan dalam standar pendidikan nasional dan berkaitan dengan KTSP.

Penilaian (penilaian pendidikan) menurut Popham (1995:3) diartikan sebagai suatu upaya formal untuk menentukan status siswa yang berkenaan dengan ketertarikan terhadap variabel-variabel pendidikan. Variabel pendidikan dapat berupa pengetahuan tentang materi pelajaran, keterampilan-keterampilan yang perlu

dikuasai, dan sikap-sikap positif dalam pendidikan. Pengertian ini menekankan bahwa penilaian sebagai suatu upaya “formal”, karena seorang manusia selalu memberikan status atau penilaian terhadap orang lain. Guru juga melakukan pertimbangan informal terhadap siswa yang bukan termasuk penilaian, seperti secara sepintas menunjuk seseorang siswa untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan atau berdasar perasaannya memilih seorang siswa untuk mengerjakan soal yang diberikan. Penilaian dalam pengertian ini berarti luas yang gunanya tidak sekedar mendiagnosis kelemahan dan kekuatan siswa, memonitor kemajuan siswa, memeringkatkan siswa, dan menentukan efektivitas pembelajaran, tetapi juga digunakan untuk memberikan citra publik terhadap efektifitas pendidikan, membantu guru dalam evaluasi proses yang dilakukannya, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Muijs dan Reynolds (2008:367) menjelaskan penilaian mengacu pada semua informasi yang dikumpulkan tentang siswa di kelas oleh guru, baik melalui pengujian formal, esai, dan pekerjaan rumah, atau secara informal melalui observasi atau interaksi. Sedang evaluasi mengacu pada proses pertimbangan (*judging*), memberi nilai (*valuing*), and memeringkatkan (*ranking*). Pengertian penilaian ini lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dibuat oleh Popham (1995). Penilaian (asesmen) dikatakan sebagai kegiatan pengumpulan data dari murid tertentu, sedang evaluasi sebagai kegiatan memberi pertimbangan, memberikan nilai, dan memeringkatkan siswa. Dalam pengertian penilaian oleh Popham (1995), pengertian evaluasi ini masih termasuk kegiatan penilaian.

Pengertian penilaian yang lebih mengacu pada proses kegiatan di kelas dirumuskan oleh Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas (2004:11). Evaluasi, pengukuran (*measurement*), tes, dan penilaian (*assessment*) memiliki makna yang berbeda. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (*value judgment*). Penilaian (*assesment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya) kemampuan siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar siswa. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha

memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat tertentu yang jelas. Khusus pengertian penilaian pada pengertian ini semakna dengan yang dikemukakan oleh Muijs dan Reynolds (2008) yang mengacu pada usaha pengumpulan informasi tentang siswa. Selanjutnya secara khusus dirumuskan pengertian penilaian kelas, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan guru baik yang mencakup aktivitas penilaian untuk mendapatkan nilai kualitatif maupun aktifitas pengukuran untuk mendapatkan nilai kuantitatif. Penilaian kelas adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk pemberian nilai terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret/profil kemampuan siswa sesuai daftar kompetensi yang ditetapkan kurikulum (Balitbang Depdiknas, 2004:11).

Pengertian penilaian, evaluasi, ulangan, dan ujian yang lebih mengikat adalah yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional (pasal 1) berikut. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Pengertian penilaian ini merupakan pengesahan dari pengertian yang diungkap oleh Balitbang Depdiknas (2004:11). Pengertian itu yang akan digunakan dalam pembahasan tulisan ini.

Penilaian berkaitan erat dengan kegiatan pembelajaran. Pada KTSP yang merupakan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian merupakan kegiatan integral dalam proses pembelajaran, sehingga disebut penilaian berbasis kelas. Kegiatan

penilaian tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisah dengan pembelajaran dan dilakukan secara terus menerus dalam setiap pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Orientasi penilaian bukan hanya pada hasil (*product oriented*) tetapi juga pada proses (*process oriented*). Hal lain bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan informasi yang menyeluruh, artinya dalam penilaian guru dapat mengembangkan berbagai jenis penilaian, baik berupa pengukuran dan pengujian tingkat kognitif, psikomotor, maupun afektif.

Penilaian pada KTSP berorientasi pada penilaian yang mengacu kriteria (penilaian acuan kriteria atau *criterion-referenced assesment*) bukan mengacu pada norma/standar (penilaian acuan norma atau *norm-referenced assesment*). Hasil belajar siswa ditentukan berdasar pada kriteria yang telah ditetapkan untuk penguasaan kompetensi. Dengan kata lain, penilaian mengacu pada kurikulum. Penilaian acuan norma tidak sepenuhnya ditinggalkan, karena digunakan seperti memilih siswa dalam rombongan belajar yang sama, atau menyeleksi siswa untuk mewakili lomba tertentu.

BSNP (2006:17-18) memberikan rambu-rambu penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.

- d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

Pada penerapan KTSP seharusnya cara penilaian mengacu pada hal-hal di atas, seperti penggunaan berbagai jenis penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur. Kenyataannya, apakah cara penilaian sudah menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri? Kemudian bagaimana menentukan batas kriteria ketuntasan minimalnya (KKM)? Apakah sudah dianalisis mengikuti ketentuan pada KTSP?

KKM merupakan batas minimal seorang siswa mencapai ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal (BSNP, 2006:12). Melihat syarat penentuan KKM harus mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata, dan kemampuan sumber daya dukung tersebut, maka untuk menentukan harus dianalisis.

Pada materi sosialisasi KTSP yang dikeluarkan depdiknas (2007) ditunjukkan bagaimana cara menganalisis KKM tersebut. Kriteria penetapan KKM meliputi: (1) kompleksitas indikator (kesulitan dan kerumitan), (2) daya dukung (sarana/prasarana, kemampuan guru, lingkungan, dan biaya), dan (3) intake siswa (masukan kemampuan siswa). Penafsiran masing-masing kriteria itu dapat menggunakan skor (1,2, atau 3) sesuai dengan bobotnya, atau skor dalam suatu rentang/interval, atau

pertimbangan *professional judgment*. Pada kurikulum sebelum KTSP, ketuntasan belajar ditetapkan oleh pusat, sehingga guru pada suatu sekolah tanpa melakukan analisis dapat langsung menggunakan batas ketuntasan itu. Bagaimana sekarang, apakah adanya kurikulum yang memberi ruang terhadap pertimbangan kondisi siswa dalam penilaian di kelas mengubah cara pandang guru? Pertanyaan tersebut yang diupayakan untuk diketahui jawabannya.

#### D. UJIAN NASIONAL DAN DAMPAK PADA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Erat kaitannya dengan penilaian adalah ujian yang dilakukan secara nasional atau dikenal Ujian Nasional. Ujian nasional merupakan kewajiban penilaian oleh pemerintah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dikatakan pada PP No 19 tahun 2005 pasal 63 tentang standar pendidikan nasional.

Pada peraturan pemerintah tersebut dikatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian tersebut digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Sedang, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Karena sifat penilaiannya yang nasional, maka seolah-olah menjadi tujuan akhir dari suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Apalagi jika melihat kegunaan ujian nasional itu, seperti disebutkan pada pasal 68 (PP Nomer 19 tahun 2005), yaitu sebagai salah satu pertimbangan untuk: (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, (b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan

berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegunaan ujian nasional ini menjadi tugas berat bagi siswa, orang tua, guru, sekolah, dinas pendidikan setempat. Beban bagi siswa dan orang tua karena ujian nasional menjadi indikator penentuan kelulusan dari sekolah dan mencari sekolah pada jenjang berikutnya. Bagi guru, ujian nasional menjadi indikator proses pendidikan yang dilakukan selama ini apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Bagi sekolah dan dinas setempat menjadikan ujian nasional sebagai indikator untuk menunjukkan mutu sekolah di mata masyarakat dan pemerintah.

Sistem penilaian ini akan mengarahkan suatu proses pembelajaran pada fokus persiapan ujian nasional. Hal tersebut seperti dikatakan Berends dalam Muijs & Reynolds, (2008:360) bahwa sistem-sistem akuntabilitas negara mempertajam trend waktu yang lebih banyak digunakan untuk penilaian, sehingga hampir seluruh pengajaran diarahkan pada persiapan-persiapan tes yang diwajibkan. Hasil pengamatan peneliti di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa paling tidak sekolah selalu mempunyai suatu program berupa bimbingan belajar untuk persiapan ujian nasional. Apakah ini berarti mengindikasikan fokus tujuan belajar hanya untuk ujian nasional yang hanya mengukur aspek kognitif? Untuk menjawab perlu dilakukan penelusuran untuk mengetahui pandangan sekolah ataupun guru-guru terhadap proses pembelajaran yang seharusnya dan kaitannya dengan ujian nasional. Apakah ujian nasional kontradiktif dengan rambu-rambu pembelajaran pada KTSP?

Marcellino (2007) pada harian Suara Pembaruan (24 February 2007) mengatakan bahwa ujian nasional kontradiktif dengan KTSP. Prinsip UN yang sentralistik, justru menghambat otonomi sekolah dalam mengembangkan kurikulumnya. KTSP merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan dan memberi tempat pada demokratisasi untuk penentuan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan konteks komunitas lokasi sekolah berada, konteks finansial, atau SDM dari sekolah yang bersangkutan. KTSP juga menyesuaikan dengan konteks kultural dari sekolah itu berada dalam komunitas tersebut. Konsekuensinya materi pokok yang dikembangkan di sekolah beragam. Perbedaan materi mungkin terjadi antar sekolah yang berada dalam satu wilayah, baik dari sisi muatan maupun kedalamannya. Di pihak lain, butir soal UN mengukur muatan tertentu dan kedalaman materi yang

sama di seluruh Indonesia. Masalah UN ini sebenarnya telah lama menjadi polemik yang tidak hanya pada masa KTSP, tetapi pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Masalah tersebut mulai dari perlu tidaknya adanya UN, kriteria penentuan kelulusan, ataupun dampak dari UN secara langsung maupun tidak langsung. Batas kelulusan pada tahun pelajaran 2007/2008 mensyaratkan siswa harus memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 dan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan Minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; atau memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00, dan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN. Kriteria tersebut memicu pro-kontra pada sebelum maupun sesudah dilaksanakan ujian tersebut. Kriteria ini lebih meningkat dari tahun pelajaran 2006/2007 yaitu memiliki nilai rata-rata minimum 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; dan khusus untuk SMK nilai mata pelajaran kompetensi kejuruan minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN; atau memiliki nilai minimum 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dengan nilai mata pelajaran lainnya yang diujikan pada UN masing-masing minimum 6,00; dan khusus untuk SMK nilai mata pelajaran kompetensi kejuruan minimum 7,00. Permasalahan juga muncul karena mata pelajaran yang diujikan dari Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris ditambah dengan mata pelajaran IPA atau mata pelajaran bidang/jurusan di SMA.

Dari sisi pemerintah merupakan hak dan kewajiban dari pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 10 dan 11, UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). UN memang sentralistik karena merupakan amanat undang-undang yang mengikat seluruh warga negara tetapi tetap memberikan wewenang pada guru dan sekolah melakukan penilaian. UN hanya mencakup beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan. Mata pelajaran tersebut dipilih karena peran sentralnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan siswa selanjutnya. Penentuan beberapa mata pelajaran ini tentu membawa konsekuensi tersendiri bagi guru mata pelajaran tersebut dan bagi guru mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional, terutama dalam proses pembelajaran.

Fokus pembahasan ini tidak pada polemik perlu tidaknya ujian nasional tetapi lebih menekankan pada dampak atau konsekuensi dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Apakah sekolah tergiring untuk memusatkan energinya pada persiapan ujian nasional atau menyiapkan dalam arti proses, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada keberhasilan ujian nasional. Dengan kata lain, apakah pembelajaran yang diselenggarakan berbasis standar ujian nasional atau pembelajaran yang berbasis tujuan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PENGEMBANGAN KTSP DI SEKOLAH

Sekolah yang dijadikan sasaran penelitian sebanyak 40 sekolah yang berada di Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Lamongan, dan Bangkalan. Komposisi sekolah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Sasaran Penelitian dan Sekolah yang sudah menyusun KTSP

Jenjang Sekolah	Status	Banyak	Sudah Menyusun	Belum Menyusun
SD	Negeri	5	2	3
	Swasta	2	2	0
	SDLB	1	1	0
SMP	Negeri	8	7	1
	Swasta	5	3	2
	SMPLB	3	0	3
SMA	Negeri	5	2	3
	Swasta	5	2	3
MTs	Negeri	1	0	1
MA	Negeri	1	1	0
	Swasta	1	0	1
SMK	Negeri	1	1	0
	Swasta	1	0	1
	Farmasi	1	0	1
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

Sekolah yang sudah menyusun kurikulum sendiri sebanyak 21 sekolah atau 52,5%, dan sekolah yang belum menyusun kurikulum sendiri sebanyak 19 sekolah atau 47,5%. Alasan tidak membuat kurikulum tersebut, antara lain karena tidak adanya dana, belum ada pelatihan, kurang memahami KTSP, dan sarana-prasarana yang terbatas.

KTSP merupakan kurikulum operasional yang harus dikembangkan satuan pendidikan berdasarkan visi dan misi sekolah tersebut. Kendala kurang pemahaman

sekolah atau guru terhadap KTSP sebenarnya telah diantisipasi dengan adanya sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan. Mungkin karena penyebarannya yang belum sampai menyeluruh, maka masih menjadi alasan sekolah untuk belum memulai mengembangkan KTSP sendiri. Depdiknas (2007) sebenarnya telah mengembangkan contoh KTSP, dan panduan pengembangan KTSP, tetapi mungkin ini belum efektif untuk diimplementasikan oleh sekolah-sekolah tersebut.

Faizah dan Ismono (2008) meneliti tentang kesiapan guru kimia SMA negeri se-kabupaten Bangkalan, Madura dalam pelaksanaan KTSP menjelaskan bahwa pemahaman guru terhadap KTSP adalah 60% dan KBM mencapai 50,59%. Menurutnya, berarti bahwa guru bidang studi Kimia dari 5 sekolah belum siap menerapkan KTSP dalam KBM. Hambatan yang terjadi karena kurangnya sosialisasi KTSP oleh Dinas Pendidikan Provinsi/setempat, kurang sumber belajar, dan media pembelajaran kurang. Sumaryanta dan Pratini (2007) juga meneliti tentang keterlaksanaan Kurikulum Matematika di Sekolah Kodya Yogyakarta menunjukkan bahwa guru masih kesulitan memahami tata urutan kompetensi dasar yang ada pada standar isi yang biasanya terurut. Artinya guru masih memandang bahwa isi kurikulum harus urut dan tertata rapi. Padahal, hal itu tidak masalah sehingga perannya sebagai pengembang kurikulum itu dapat terjadi sesuai dengan kreativitasnya.

Hambatan pengembangan kurikulum itu perlu ditindaklanjuti dengan mencari cara yang efektif untuk melengkapi atau mendukung program-program sebelumnya. Tidak adanya dana sebenarnya tergantung dari manajemen kepala sekolah atau yayasan dari satuan pendidikan sendiri, karena dana yang diperlukan relatif tidak terlalu besar. Pada penyusunan KTSP sebenarnya ada butir-butir pekerjaan yang sebenarnya menjadi tugas pokok dan fungsi dari bagian kurikulum, kepala sekolah, dan guru, seperti perumusan visi, misi, dan tujuan, atau penyusunan silabus dan RPP. Kebutuhan dana harus didasarkan pada pentingnya suatu kegiatan dan produk yang dihasilkan. Dengan demikian perlu kesadaran dan motivasi dari sekolah (kepala sekolah atau yayasan) sehingga memprioritaskan dana untuk keperluan ini. Sumber dana dapat dilakukan dari swadaya komite sekolah atau bantuan pihak luar.

Hambatan karena kurang pemahaman pihak sekolah yang belum maksimal terhadap KTSP dapat ditingkatkan melalui supervisi sekolah oleh pengawas. Kurang pelatihan sebenarnya suatu tindakan yang diberikan agar guru atau pihak sekolah

lebih memahami KTSP. Pelatihan yang dilakukan departemen maupun diknas setempat bisa tetap dilakukan, tetapi dengan jaminan bahwa pelatihan itu harus memberi produk yang bisa langsung diimplementasikan. Jadi perlu teknik pelatihan yang komprehensif, seperti sebelum pelatihan diinformasikan kepada peserta untuk membawa data-data atau hal-hal yang digunakan untuk penyusunan KTSP dan setelah pelatihan ada monitoring dari pihak yang kompeten, seperti perguruan tinggi. Hal lain adalah dengan cara pendampingan masing—masing sekolah atau pencangkakan/detasiring dari sekolah yang sudah mengembangkan. Tindakan lain adalah dengan mengoptimalkan tugas pengawas yang salahnya pada aspek manajerial. Pengawas diberikan target untuk mengatasi sekolah-sekolah yang belum mengembangkan KTSP dan memberikan reward berupa SK atau piagam penghargaan yang dapat digunakan untuk sertifikasi jika berhasil dan diterapkan punishment jika tidak memenuhi target yang diberikan.

Sarana dan prasarana yang terbatas sebenarnya tidak perlu dipandang sebagai hambatan tetapi justru tantangan. Kesadaran ini sulit ditanamkan pada guru. Masalah utama sebenarnya adalah kurangnya motivasi dan keberanian untuk berbuat sesuatu. Menyalahkan, memaklumi, dan menolak suatu kenyataan merupakan hambatan untuk memotivasi diri sendiri (motivasi internal). Sarana prasarana dalam pembelajaran dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang murah dan terjangkau.

## **B. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AKTIF**

Berdasar observasi terhadap sekolah-sekolah sasaran ternyata RPP yang dikembangkan oleh guru-guru pada 23 sekolah secara administratif telah menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau inovatif dengan menggunakan pembelajaran kontekstual atau diskusi, sedang sisanya sebanyak 17 sekolah belum menunjukkan inovasi. Guru-guru dalam pelaksanaannya pada 21 sekolah sudah menerapkan RPP yang dibuat, sedang sisanya belum. Guru menyusun RPP yang inovatif, tetapi tidak diterapkan karena RPP tidak dibuat sendiri. RPP tersebut hasil dari kelompok guru melalui KKG atau MGMP atau penerbit buku.

Guru-guru pada sekolah yang tidak menyusun RPP yang menunjukkan keaktifan siswa bukan berarti tidak mendorong keaktifan siswa ketika belajar di kelas. Keaktifan siswa pada sekolah ini hanya 30-40% dari seluruh kegiatan

pembelajaran yang dilakukan guru. Sedang guru-guru pada sekolah-sekolah yang sudah mengaktifkan siswa, keaktifannya 50-80% dari seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi ada kegiatan belajar maksimal sekitar 20% yang masih menggunakan cara ceramah atau metode konvensional.

KTSP minimal digunakan dalam menyusun tujuan dan indikator, menentukan materi sesuai indikator dan tujuan, menyusun strategi pembelajaran, dan menentukan pilihan penilaian yang akan dilakukan. Dari 21 sekolah yang sudah menyusun KTSP, ternyata terdapat guru-guru pada 23 sekolah yang menyusun pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini berarti bahwa KTSP dijadikan pedoman mengembangkan tujuan dan strategi pembelajaran yang inovatif.

Faizah dan Ismono (2008) menjelaskan bahwa guru pada sekolah yang menjadi sasaran penelitian belum siap menerapkan KTSP dalam KBM, salah satunya karena kurang tersedianya sumber belajar, media pembelajaran yang representatif, dan kurangnya alat-alat laboratorium. Sumaryanta dan Pratini (2007) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi masih sulit dilakukan, karena pengalaman guru dan siswa selama ini yang masih menekankan pada pembelajaran berbasis materi. Meskipun guru memahami bahwa pembelajaran harus berorientasi pada kompetensi siswa, melibatkan siswa aktif, dan guru sebagai fasilitator, tetapi dalam pelaksanaannya budaya itu sulit ditinggalkan. Siswa juga masih lebih memperhatikan materi yang sedang dipelajari daripada kompetensi apa yang harus dimiliki. Jadi ada beberapa kendala dalam implementasi RPP yang sudah dibuat atau digunakan guru.

Guru secara administratif telah menyusun sesuai orientasi kurikulum dalam pembelajaran, tetapi sulit untuk dilaksanakan karena beberapa hal. Pada sekolah-sekolah luar biasa (SD atau SMP), karena kondisi siswa yang terbatas, seperti cacat atau tingkat kemampuan siswa yang di bawah rata-rata, serta kemampuan komunikasi yang tidak lancar. Pada sekolah yang tidak mengembangkan KTSP, karena pemahaman tentang bagaimana pembelajaran yang seharusnya diterapkan belum dipahami. Siswa masih berorientasi pada ketuntasan atau penguasaan materi yang akan diujikan pada ujian-ujian nasional atau ujian akhir, sehingga penekanan pembelajaran pada selesainya materi yang diajarkan. Selain itu, pandangan guru terhadap siswa yang menurutnya memiliki kemampuan rendah, sehingga perlu diajarkan satu per satu materi. Pada sekolah yang mengembangkan KTSP tetapi

dalam pelaksanaan RPP-nya tidak sesuai dengan yang dirancang, karena ketidakpercayaan guru maupun sekolah tentang pentingnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hal lain yang menghambat pelaksanaan itu adalah guru tidak memahami pembelajaran tematik, IPA/IPS terpadu, sikap dan minat siswa rendah (untuk sekolah-sekolah swasta), dan sarana prasarana tidak mendukung.

### **C. PELAKSANAAN PENILAIAN BERBASIS KELAS**

Pada Sekolah yang sudah menyusun KTSP, guru-guru dalam melaksanakan penilaian cenderung menggunakan metode yang bervariasi, seperti tes lisan, kinerja, pengamatan, presentasi, atau portofolio. Sebaliknya, pada sekolah yang belum menyusun KTSP, guru cenderung hanya menggunakan metode tes untuk menilai kemampuan siswa. Dari 40 sekolah, guru-guru pada 13 sekolah hanya menggunakan metode tes untuk menilai siswa, sedang sisanya minimal ditambah dengan penilaian kinerja.

Penilaian merupakan masalah yang masih tetap hangat pada pelaksanaan KTSP maupun KBK (Kurikulum 2004). Pada KBK mulai diimplementasikan penilaian berbasis kelas atau penilaian otentik/alternatif. Penilaian tersebut merupakan hal baru yang memunculkan kebingungan bagi guru yang sudah biasa dengan penilaian kognitif dengan kertas dan pensil. Penilaian yang holistik untuk menilai 40-50 siswa dalam satu kelas memicu keraguan guru, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Belum lagi prosedur penilaian yang mengharuskan guru menyusun kriteria atau rubrik penilaian. Pengamatan penulis yang tertuang dalam Siswono (2004) menunjukkan bahwa umumnya guru menggunakan tes tulis dan pensil dalam penilaian dan meyakini bahwa cara itu merupakan cara yang efektif dan efisien. Ketika menghadapi pandangan baru dalam penilaian, guru meragukan tentang pentingnya penilaian itu. Penjelasan rasional dalam perspektif pendidikan tidak cukup, seperti penilaian harus meliputi aspek yang holistik (kognitif, afektif, psikomotor), atau menunjukkan kemanfaatan bagi siswa. Perlu dibangkitkan emosi dan motivasinya bahwa penilaian apa adanya seluruh kemampuan siswa merupakan tanggung jawab dan tugas sebagai guru yang akan dinilai oleh Tuhan kelak.

Hasil sosialisasi dan implementasi KBK (Kurikulum 2004) sebelum KTSP terutama untuk model penilaian di kelas sudah semakin membawa kesadaran dan perubahan pada guru untuk melaksanakan penilaian berbasis kelas. Sayangnya

kesadaran itu mulai tercemar dengan keraguan model ujian nasional yang menggunakan tes tulis. Model penilaian itu dipandang kontradiktif dengan penilaian berbasis kelas. Padahal sebenarnya, model penilaian itu model penilaian yang harus dikembangkan oleh guru di kelas bukan penilaian yang merupakan tanggung jawab pemerintah yang sifatnya masal menilai mutu pendidikan siswa di suatu satuan pendidikan. Hasil penelitian terhadap 40 sekolah ini menunjukkan bahwa sekolah yang sudah mengembangkan KTSP cenderung menggunakan penilaian berbasis kelas dengan berbagai model penilaian seperti kinerja, tes lisan, penugasan, presentasi, observasi, atau portofolio.

Hasil penelitian Sumaryanta dan Pratini (2007) menunjukkan bahwa guru matematika sudah melakukan penilaian yang meliputi aspek kognitif dan afektif. Aspek psikomotor tidak dinilai karena dianggap tidak dominan pada pelajaran matematika. Penilaian afektif agak menyulitkan karena harus memahami siswa secara individu yang jumlahnya cukup banyak pada setiap kelas. Tetapi, penilaian terhadap aspek ini diyakini memberikan dampak positif terhadap siswa, seperti mereka terdorong lebih rajin, aktif dan termotivasi belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem penilaian yang dicanangkan KTSP yang bersifat holistik dapat memberi dampak yang positif bagi siswa maupun guru.

Dalam penilaian terutama aspek kognitif perlu ditetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang digunakan sebagai acuan dalam mengetahui ketercapaian tujuan belajar yang diharapkan.

#### **D. PENETAPAN KKM**

Pada KTSP, penentuan batas minimal ketuntasan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan atau indikator belajar berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu KBK 2004 atau Kurikulum 1994. Pada Kurikulum 1994, ketuntasan belajar siswa ditentukan secara individu dan klasikal yang sudah ditetapkan secara nasional tercantum pada dokumen penilaian KTSP. Siswa dikatakan tuntas secara individu, jika telah mencapai minimal skor 65, sedang ketuntasan klasikal jika banyak siswa yang telah mencapai skor minimal 65 adalah lebih dari 85% dari seluruh siswa dalam satu kelas. KBK 2004 memberikan kebebasan sekolah untuk menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator dengan pertimbangan kondisi sekolah, seperti kemampuan siswa dan guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Pada

kenyataannya pertimbangan ini ditetapkan langsung oleh sekolah tanpa menganalisis kondisi sebenarnya suatu sekolah. Pada KTSP dibuatkan suatu pedoman bagaimana menganalisis KKM itu sehingga dapat digunakan sekolah secara efektif. Bagaimana kenyataannya di lapangan?

Penentuan KKM pada hampir semua sekolah yang diamati ditetapkan tanpa analisis sesuai metode yang digunakan dalam KTSP. Sebanyak 3 sekolah yang sudah menggunakan cara penetapan dari KTSP dengan mempertimbangkan faktor kemampuan rata-rata siswa (*intake* siswa), kompleksitas indikator, dan daya dukung sarana dan prasarana. KKM yang ditetapkan masing-masing sekolah bervariasi sekitar skor 60-75. KKM tersebut ada yang ditetapkan untuk semua pelajaran, misalkan 65, ada juga untuk masing-masing mata pelajaran berbeda.

Perubahan metode penentuan KKM pada KTSP ini belum secara langsung diikuti dalam prakteknya. Pengaruh kurikulum sebelumnya tampaknya masih kuat, sehingga sekolah-sekolah belum memandang perlu melakukan analisis terhadap KKM yang berlaku di sekolah itu. Sekolah masih banyak yang hanya memandang kepraktisan saja, seperti dengan memuat kriteria yang sama untuk tiap mata pelajaran seperti pada Kurikulum 1994. Padahal kemungkinan sekolah itu mempunyai fasilitas, latar belakang siswa, dan tingkat kesulitan materi yang berbeda.

Pada sekolah yang diamati menunjukkan bahwa sarana prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai dari gedung hingga sarana di kelas, sehingga tidak menjadi alasan yang mendesak untuk dikatakan sebagai hambatan. Sekolah perlu melakukan analisis KKM untuk menunjukkan kekhasan sekolah itu. Tiap-tiap sekolah mungkin mempunyai KKM yang berbeda yang menunjukkan standar optimal bagi sekolah itu. Sekolah pada suatu kondisi bisa saja KKM-nya lebih tinggi daripada KKM sekolah lain dengan kondisi berbeda. Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya merupakan prinsip pelaksanaan yang diwadahi pada KTSP, yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

#### **E. DAMPAK UNAS DALAM PEMBELAJARAN DI KELAS**

Hasil pengamatan terhadap 40 sekolah menunjukkan bahwa pada 15 sekolah yang diamati menunjukkan bahwa patokan kelulusan pada UNAS tidak berdampak pada pembelajaran yang dikembangkan guru, sedang sisanya menunjukkan bahwa

UNAS berdampak pada pembelajaran yang hanya memusatkan pada ketuntasan materi bukan pada kompetensi yang diharapkan. Berarti hasil ini sejalan dengan pendapat Barends dalam Mujis & Reynolds (2008) yang mengatakan bahwa sistem akuntabilitas terhadap penilaian sekolah mengarahkan program-program pengajaran yang mengarah pada ketercapaian penilaian itu.

Pada sekolah yang sudah menyusun KTSP atau sekolah lebih "maju"/favorit di suatu daerah, juga sekolah luar biasa atau sekolah kejuruan, adanya UNAS tidak berpengaruh pada pembelajaran karena sudah disiapkan program pembimbingan di luar jam pelajaran untuk persiapan UNAS, atau kondisi siswa yang kurang/terbatas tidak mengejar pada pengembangan kognitif, tetapi pada keterampilan setelah lulus.

Sebaliknya pada sekolah-sekolah umum lain (swasta ataupun negeri) memberi dampak pada pembelajaran. Misalkan, pada tingkat SD, kelas V sudah diusahakan untuk menyelesaikan/menuntaskan semua materi yang dibahas hingga kelas VI atau pada awal kelas VI harus sudah tuntas, sehingga waktu belajar dihabiskan untuk mem-drill soal-soal yang diunaskan. Apalagi sekolah dengan input yang tidak menguntungkan, berusaha meningkatkan kuantitas lulusannya. Pandangan guru pada sekolah-sekolah ini masih melihat tujuan pendidikan hanya mencapai kelulusan atau ketuntasan materi, belum secara terpadu memandang pendidikan sebagai proses pendewasaan seorang anak untuk mempersiapkan bekal hidup di masyarakat.

Pada sekolah yang sudah "maju" (sekolah-sekolah dengan sarana prasarana memadai, SDM yang cukup berkualitas, termasuk sekolah favorit) dengan input siswa yang lebih menguntungkan lebih memandang bahwa ujian nasional merupakan sebagian tujuan belajar, dan sekolah meyakini bahwa siswa-siswanya mampu mencapai syarat minimal kelulusan itu. Sekolah-sekolah ini sudah cukup optimal menyusun KTSP dan melaksanakannya. Tujuan-tujuan pembelajaran yang melibatkan siswa aktif melalui diskusi-presentasi tetap menjadi prioritas, di samping sekolah itu juga mempersiapkan ujian nasional itu melalui bimbingan belajar di sekolah atau lainnya.

Masalah UN ini sebenarnya telah lama menjadi polemik yang tidak hanya pada masa KTSP, tetapi pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Masalah yang menjadi perdebatan saat ini adalah tentang batas kelulusan yang tiap tahun semakin meningkat. Peningkatan tersebut sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk

menjamin mutu pendidikan pada tiap jenjang pendidikan. Bila melihat dampak yang muncul pada media, seperti demo menentang UNAS, UNAS melanggar HAM, UNAS kontradiksi dengan KTSP, atau UNAS memunculkan kecurangan dari guru/siswa, cukup menyesak dada. Apalagi media menunjukkan beberapa siswa yang terkena dampak itu, seperti siswa satu sekolah tidak lulus UNAS (Padahal satu sekolah siswanya hanya 12 orang). Kondisi ini cukup memprihatinkan, sehingga tidak dapat dibedakan nuansanya antara menggambarkan kondisi yang sebenarnya atau hanya bersifat provokatif saja.

Penentuan batas kelulusan tetap perlu diberikan untuk mencapai kelulusan, agar terdapat patokan yang standar dari output siswa pada suatu tingkat pendidikan. Masalahnya orang tua, guru, maupun siswa belum terbiasa menerima keadaan itu. Sistem pendidikan di Indonesia selama ini masih tidak memberi ruang bahwa siswa tidak lulus dari suatu tingkat pendidikan. Apapun kondisinya, siswa yang masuk pada jenjang tertentu pasti lulus bagaimanapun hasilnya. Tuntutan masyarakat yang mengedepankan pada kualitas individu saat ini mengharuskan adanya ukuran atau standar minimal yang baku. Memang jaminannya tidaklah 100% berhasil atau sesuai harapan, pasti ada efek-efek yang mengganggu. Seharusnya perlu disikapi bahwa secara alami manusia atau seorang siswa itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Bila ditinjau pada aspek keadilan mungkin juga memberi dampak yang cukup berarti, karena kondisi sosial, geografis, dan sumber daya pada tiap wilayah di Indonesia yang berbeda. Kasus tingkat kelulusan di DKI yang hampir 100% tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kelulusan daerah lain yang tidak mencapai 90%, karena kondisi sekolah-sekolah yang tidak sama. Kenyataan ini dapat dipandang sebagai tantangan untuk meningkatkan yang lebih baik, bukan menyalahkan batas kelulusan yang ditetapkan atau memaklumkan tentang kondisi sekolah/siswa yang ada. Perlu keberanian dan optimisme untuk mengawal mutu pendidikan melalui UNAS ini.

Selain sisi negatif dari adanya UNAS dan batas kelulusan itu, sebenarnya ada beberapa sisi positif yang berkembang pada masyarakat. Pertama, perhatian orang tua atau masyarakat terhadap pendidikan makin meningkat. Orang tua minimal menanyakan atau mendorong putranya untuk lebih giat belajar dalam mempersiapkan UNAS. Kedua, aspek-aspek ujian yang dulu hanya dilihat dari persiapan belajar terhadap materi pelajaran, sekarang lebih komprehensif dengan mempersiapkan aspek mental dengan mengadakan kegiatan keagamaan atau kegiatan

lain yang memberikan dorongan semangat dan keyakinan. Ketiga, perhatian dan persiapan guru dalam pembelajaran juga semakin meningkat kualitasnya, karena terdorong agar siswanya dapat mencapai batas kelulusan itu. Keempat, sekolah-sekolah semakin kreatif mengembangkan program-program untuk persiapan ujian nasional yang tidak hanya sekedar bimbingan belajar materi tertentu. Kelima, adanya program-program pemerintah atau depdiknas yang sifatnya untuk meningkatkan mutu sekolah-sekolah atau guru dalam pembelajaran yang didasarkan pada data yang aktual dari hasil UNAS, seperti pelatihan, penataran-penataran, atau bantuan-bantuan sarana dan prasarana.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa

1. Sekolah-sekolah ternyata masih ada yang belum mengembangkan KTSP. Dari 40 sekolah yang sudah menyusun kurikulum sendiri sebanyak 21 sekolah atau 52,5%, dan sekolah yang belum menyusun kurikulum sendiri sebanyak 19 sekolah atau 47,5%. Alasan tidak membuat kurikulum tersebut, antara lain karena tidak adanya dana, belum ada pelatihan, kurang memahami KTSP, dan sarana-prasarana yang terbatas.
2. Guru-guru pada 23 sekolah secara administratif telah menyusun RPP yang menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau inovatif dengan menggunakan pembelajaran kontekstual atau diskusi, sedang sisanya sebanyak 17 sekolah belum menunjukkan inovasi. Guru-guru dalam pelaksanaannya pada 21 sekolah sudah menerapkan RPP yang dibuat, sedang sisanya belum. Guru menyusun RPP yang inovatif, tetapi tidak diterapkan karena RPP tidak dibuat sendiri. RPP tersebut hasil dari kelompok guru melalui KKG atau MGMP atau penerbit buku.
3. Keaktifan siswa pada sekolah yang gurunya tidak menyusun RPP inovatif hanya 30-40% dari seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru. Sedang guru-guru pada sekolah-sekolah yang sudah mengaktifkan siswa, keaktifannya 50-80% dari seluruh kegiatan pembelajaran. Jadi ada kegiatan belajar maksimal sekitar 20% yang masih menggunakan cara ceramah atau metode konvensional.
4. Pada Sekolah yang sudah menyusun KTSP, guru-guru dalam melaksanakan penilaian cenderung menggunakan metode yang bervariasi, seperti tes lisan,

kinerja, pengamatan, presentasi, atau portofolio. Sebaliknya, pada sekolah yang belum menyusun KTSP, guru cenderung hanya menggunakan metode tes untuk menilai kemampuan siswa. Dari 40 sekolah, guru-guru pada 13 sekolah hanya menggunakan metode tes untuk menilai siswa, sedang sisanya minimal ditambah dengan penilaian kinerja.

5. Penentuan KKM pada hampir semua sekolah yang diamati ditetapkan tanpa analisis sesuai metode yang digunakan dalam KTSP. Sebanyak 3 sekolah yang sudah menggunakan cara penetapan dari KTSP dengan mempertimbangkan faktor kemampuan rata-rata siswa (*intake* siswa), kompleksitas indikator, dan daya dukung sarana dan prasarana.
6. Pada sekolah yang diamati menunjukkan bahwa sarana prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai dari gedung hingga sarana di kelas, sehingga tidak menjadi alasan yang mendesak untuk dikatakan sebagai hambatan.
7. Hasil pengamatan terhadap 40 sekolah menunjukkan bahwa pada 15 sekolah yang diamati menunjukkan bahwa patokan kelulusan pada UNAS tidak berdampak pada pembelajaran yang dikembangkan guru, sedang sisanya menunjukkan bahwa UNAS berdampak pada pembelajaran yang hanya memusatkan pada ketuntasan materi bukan pada kompetensi yang diharapkan.

Berdasar kondisi di atas, maka perlu bagi pemerintah (depdiknas) untuk mengatur mekanisme yang lebih optimal agar tiap satuan pendidikan mempunyai/sudah mengembangkan KTSP sesuai dengan program depdiknas paling lambat sampai tahun pelajaran 2009/2010 (BSNP, 2006). Pengembangan KTSP harus diikuti dengan pengembangan perangkat pembelajaran (silabus, RPPP, media, penilaian) yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan KTSP. Selain itu, sekolah ataupun guru harus menyadari peran UNAS dalam KTSP dan mengoptimalkan program-program kreatif di sekolah yang mendorong pencapaian target kelulusan tanpa mengorbankan prinsip pembelajaran yang seharusnya, yaitu pembelajaran yang memanusiakan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang, Depdiknas. (2004). *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004. Penilaian Kelas*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, Depdiknas
- BSNP. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP, Depdiknas
- Depdiknas (2007). Materi Sosialisasi dan Pelatihan KTSP SMP. Jakarta: Depdiknas
- Faizah, Hanun dan Ismono. (2008). *Kesiapan Guru Bidang Studi Kimia SMA Negeri Se-Kabupaten Bangkalan dalam Pelaksanaan KTSP*. Makalah Seminar Nasional Pendidikan Sains, Prodi Pendidikan Sains, FMIPA Unesa. Surabaya, 28 Juni 2008
- Mujis, Daniel dan Reynolds, David. (2008). *Effective Teaching. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan nasional. Jakarta: Depdiknas
- Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran. Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siswono, Tatag Yuli Eko. (2004). *The Challenge of Indonesian Mathematics Teachers To Face the New Curriculum*. Paper presented on discussion in Department of Science and Mathematics Education, University of Melbourne, 28<sup>th</sup> May 2004
- Suara Pembaharuan. (2007). *KTSP Kontradiktif dengan Ujian Nasional*. Tanggal 24 Pebruari 2007.
- Suara Pembaharuan. (2007). *Depdiknas Sediakan Kurikulum Siap Pakai*. Tanggal 23 Januari 2007.
- Sumaryanta dan Pratini, Sri Haniek. (2007). *Kajian Keterlaksanaan Kurikulum Mata Pelajaran Matematika di Sekolah (Studi Kasus Pada SMA Pelaksana Terbatas Kurikulum Bebrbasis Kompetensi di Koto Yogyakarta)*. Jurnal Pendidikan Matematika "Transformasi". Volume 1 Nomer 1 Oktober 2007, ISSN 1978-7847, Hal. 63-81
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional beserta penjelasannya. Jakarta: Depdiknas